

BAB I

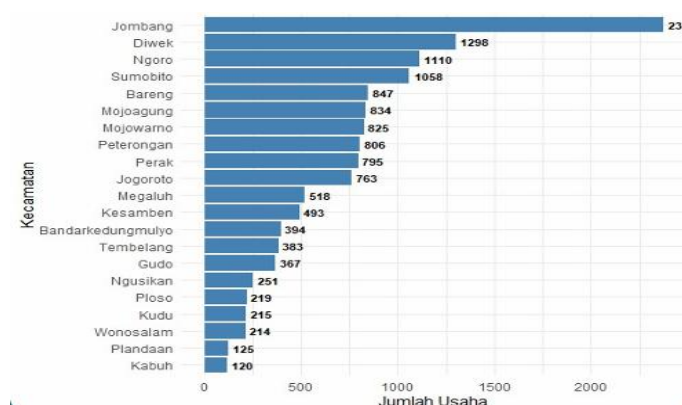
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65,5 juta unit pada tahun 2021 dan berkontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menyerap tenaga kerja hingga 97% dari total tenaga kerja Indonesia (Kemenko Perekonomian RI., 2023). Angka ini menunjukkan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, terutama sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi inklusif dan penciptaan lapangan kerja khususnya di wilayah yang jauh dari pusat perkotaan dan perindustrian. UMKM juga berperan penting dalam memperkuat fondasi ekonomi domestik melalui diversifikasi sektor usaha, salah satunya sektor makanan dan minuman yang menjadi penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan UMKM nasional (Astuti et al., 2025). Sektor ini memiliki potensi yang besar karena bersumber dari kebutuhan dasar masyarakat dan didukung oleh ketersediaan bahan baku lokal yang melimpah serta kreativitas pelaku usahanya dalam mengembangkan produk yang memiliki nilai tambah.

Hal ini juga tercermin di Kabupaten Jombang, khususnya di Kecamatan Wonosalam yang dikenal sebagai sentra usaha berbasis pertanian, perdagangan, dan pariwisata alam. Berdasarkan data (Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang, 2025), mata pencaharian terbesar masyarakat Wonosalam berada pada bidang

pertanian, perikanan, dan peternakan dengan jumlah 7.342 penduduk dari total 37.492 jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat Wonosalam masih didominasi oleh sektor agraris yang memiliki potensi besar untuk mendukung perkembangan UMKM lokal. Meskipun demikian, pelaku UMKM pada kenyataannya masih menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan usahanya terutama kinerja keuangan yang belum optimal akibat lemahnya pengelolaan keuangan dan kurangnya kemampuan dalam perencanaan finansial. Banyak UMKM masih menggunakan pencatatan keuangan sederhana bahkan tidak melakukan pembukuan secara teratur, sehingga kondisi keuangan usaha sulit dipantau secara akurat (Habibah et al., 2023). Selain itu, keterbatasan akses serta kurang optimalnya pemanfaatan pembiayaan pemerintah juga menyebabkan peningkatan kinerja usaha belum maksimal (Fachruzzaman et al., 2021).



Gambar 1.1 Jumlah UMKM di Kabupaten Jombang

Sumber: Dinkop Kab. Jombang, 2025

Berdasarkan data jumlah UMKM di Kabupaten Jombang, Kecamatan Wonosalam hanya memiliki sekitar 214 unit usaha, sehingga termasuk tiga wilayah dengan jumlah UMKM terendah dibandingkan kecamatan lain seperti Jombang

(± 2.300 unit) dan Diwek (± 1.298 unit). Dengan kondisi geografis Wonosalam yang menjadi wilayah paling luas diantara 12 kecamatan di Kabupaten Jombang seharusnya wilayah tersebut memiliki potensi yang lebih besar dalam pengembangan UMKM, terutama pada sektor unggulan daerah seperti makanan dan minuman. Kondisi ini mencerminkan bahwa perkembangan usaha di Wonosalam masih relatif rendah.

Berdasarkan survei berbagai lembaga, salah satu hal utama yang menghambat ekspansi usaha adalah pendanaan (Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia, 2018). Laporan *MSME Empowerment* (2022) menunjukkan bahwa 51,2% pelaku usaha mikro mengalami kesulitan dalam memperoleh dukungan modal, yang berdampak langsung pada keterbatasan pengembangan usaha, peningkatan kapasitas produksi, serta perbaikan kualitas produk. Akibatnya, sebagian besar usaha mikro masih bergantung pada sumber pembiayaan informal dengan bunga tinggi yang menekan profitabilitas dan menghambat ekspansi usaha. Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai program pembiayaan dengan bunga rendah untuk mendukung sektor produktif, kenyataannya sebagian pelaku usaha belum mampu memanfaatkan dana yang diperoleh secara optimal. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi atau memperluas pasar sering kali dialokasikan untuk keperluan konsumtif, sehingga potensi peningkatan kinerja keuangan dan daya saing usaha belum dapat terealisasi secara maksimal.

Salah satu faktor kunci dalam menjaga stabilitas usaha adalah pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan merupakan aspek fundamental dalam

menentukan keberhasilan dan keberlanjutan usaha, terutama untuk pelaku UMKM yang sering kali mengalami keterbatasan dalam pemanfaatan sumber daya. Menurut Kasmir (2014), pengelolaan keuangan mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap seluruh aktivitas keuangan perusahaan agar tujuan usaha dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam konteks UMKM, Penerapan manajemen keuangan yang tepat membantu UMKM dalam menyusun catatan keuangan secara teratur, mengendalikan pengeluaran, serta memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung efisiensi usaha (Paraswati & Aisa, 2025). Selain itu, pengelolaan keuangan yang baik juga membantu pelaku UMKM untuk memahami posisi keuangan usaha, meminimalkan risiko kerugian, dan membuat keputusan strategis yang berbasis data akurat (Angraini et al., 2025).

Sejalan dengan pentingnya pengelolaan keuangan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga menjadi faktor strategis yang memengaruhi keberhasilan UMKM yang memiliki keterbatasan modal dan akses pembiayaan. Menurut Permenko Perekonomian No. 1 Tahun 2026, Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan fasilitas pembiayaan atau pinjaman yang diberikan untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi kepada individu, badan usaha, atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak dijalankan, tetapi belum mempunyai jaminan tambahan yang memadai sesuai ketentuan perbankan. Lembaga penyalur dana KUR meliputi lembaga keuangan dan koperasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan pinjaman dengan suku bunga rendah, yaitu sebesar 3%–6% per tahun. Adapun angunan yang ditetapkan terdiri atas 2 hal yaitu angunan pokok

yang berupa usahanya dan angunan tambahan berupa aset berwujud. Dengan persyaratan yang mudah dan fleksibel seperti usahanya telah berjalan paling singkat 6 bulan serta memiliki NIB atau surat keterangan usaha usaha, pelaku usaha diharapkan dapat memaksimalkan dana KUR yang ada guna untuk meningkatkan kapasitas usahanya. Penelitian yang dilakukan oleh Wang et al. (2023) juga menemukan bahwa UKM lebih cenderung menggunakan sumber pembiayaan eksternal formal (bank dan non-bank) untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek dan jangka panjang. Namun, penggunaan dan pemanfaatan pinjaman tersebut juga harus diimbangi dengan pemahaman mengenai pengelolaan atau literasi keuangan yang baik agar dana yang diperoleh dapat dikelola secara tepat dan dimanfaatkan secara produktif untuk pengembangan usaha.

Literasi keuangan merupakan salah satu aspek penting yang perlu dimiliki pelaku usaha dalam mengelola keuangan secara efektif. Literasi keuangan mencakup pengetahuan, kemampuan, dan kepercayaan diri yang diperlukan untuk pengelolaan uang yang efisien (Octavina & Rita, 2021). Tingkat literasi yang tinggi membantu pelaku usaha mengatur arus kas, merencanakan keuangan jangka panjang, serta memanfaatkan pinjaman secara produktif (Hanasri et al., 2023). Penelitian oleh Alamsyah (2020) menunjukkan pentingnya literasi keuangan dalam pengambilan keputusan. dan pengelolaan usaha yang berkelanjutan. Dengan tingkat literasi yang memadai, pelaku UMKM dapat mengoptimalkan penggunaan modal, menekan risiko keuangan, dan meningkatkan efisiensi dalam setiap aktivitas operasional usahanya.

Hasil dari sejumlah penelitian sebelumnya saling bertentangan mengenai pengaruh pengelolaan keuangan serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap kinerja keuangan UMKM. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Habibi et al. (2022) menunjukkan jika pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggriani. (2023) yang menunjukkan pengelolaan keuangan berpengaruh negatif terhadap kinerja UMKM. Sedangkan terkait pembiayaan kredit KUR penelitian Manyanga et al. (2023) dan Moussa (2020) menemukan bahwa pembiayaan utang dan pinjaman mikro berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan profitabilitas UMKM, sementara penelitian yang dilakukan oleh (Sebo Nakabili et al., 2020) justru menunjukkan bahwa fasilitas kredit bank tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM.

Ketidakselarasan hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan mengenai pengaruh pengelolaan keuangan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat meningkatkan atau justru menurunkan kinerja keuangan. Dengan ketidak konsistenan tersebut penelitian ini memberikan kebaruan yang terletak pada penggunaan literasi keuangan sebagai variabel moderasi, yang sebelumnya belum banyak dikaji dalam penelitian sejenis. Penggunaan literasi keuangan berpotensi menjadi katalisator yang memperkuat hubungan tersebut dengan meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola dan memanfaatkan dana secara lebih produktif. Serta fokus pada UMKM di Kecamatan Wonosalam yang dimana Kecamatan Wonosalam dikenal sebagai sentra UMKM berbasis pengolahan hasil bumi dan pertaniannya, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan

gambaran empiris baru yang berbeda dengan studi sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada UMKM di perkotaan atau sektor perdagangan.

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk dilakukan agar dapat memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai pengaruh pengelolaan keuangan dan kredit usaha rakyat terhadap kinerja keuangan UMKM, dengan faktor moderasi dalam hubungan ini adalah literasi keuangan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku UMKM dalam mengelola sumber daya keuangan secara lebih bijak.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang dapat dinyatakan berdasarkan konteks yang telah disebutkan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Wonosalam Jombang?
2. Apakah Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Wonosalam Jombang?
3. Apakah literasi keuangan memperkuat atau meperlemah hubungan antara pengelolaan keuangan dengan kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Wonosalam Jombang?
4. Apakah literasi keuangan memperkuat atau meperlemah hubungan antara Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Wonosalam Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat dirumuskan tujuan penelitian dibawah ini:

1. Untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Wonosalam Jombang.
2. Untuk mengetahui apakah Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Wonosalam Jombang.
3. Untuk mengetahui apakah literasi keuangan memperkuat atau meperlemah pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Wonosalam Jombang.
4. Untuk mengetahui apakah literasi keuangan memperkuat atau meperlemah pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Wonosalam Jombang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pelaku UMKM

Diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya pengelolaan keuangan dan pemanfaatan dana KUR secara bijak agar mampu meningkatkan kinerja keuangan usaha. Selain itu, pelaku UMKM dapat menggunakan temuan penelitian sebagai panduan dalam meningkatnya kemampuan literasi keuangan sehingga mereka dapat meminimalkan risiko kesalahan pengambilan keputusan yang dapat berdampak pada stabilitas kinerja keuangan.

2. Bagi Pihak Akademis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang manajemen keuangan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur terkait hubungan pengelolaan keuangan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kliterasi keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM, sekaligus menjadi referensi bagi mahasiswa atau akademisi dalam melakukan penelitian sejenis. Selain itu, Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris yang mendukung dan memperkuat teori manajemen keuangan yang ada.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini bisa menjadi rujukan dan landasan untuk penelitian berikutnya, baik dengan memperluas variabel yang digunakan, menambah objek penelitian di wilayah lain, maupun menggunakan metode analisis yang berbeda. Dengan demikian, penelitian selanjutnya dapat memperoleh hasil yang lebih menyeluruh terkait pengelolaan keuangan, dana KUR dan pengaruhnya terhadap kinerja UMKM.

4. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Saat membuat inisiatif pemberdayaan UMKM, pemerintah daerah dan organisasi pembuat kebijakan dapat mempertimbangkan temuan studi ini, khususnya dalam hal penyediaan akses pembiayaan yang tepat sasaran serta pengembangan program pelatihan literasi keuangan dan manajemen jkeuangan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam pengelolaan keuangan yang efisien dan jangka panjang.